

# Implementasi Pemadanan NIK Dengan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bogor

Fazril Haikhal Rachman, Rizal Riyadi

Program Studi Perbankan Dan Keuangan Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan  
Bogor

E- mail:[fazrilhaikhalr@gmail.com](mailto:fazrilhaikhalr@gmail.com)

Implementation  
of Personal Tax  
Payer Datas

91

Submitted  
OCTOBER 2024

Accepted  
MARCH 2025

## ABSTRACT

The aim of this review is to study how the matching of the Residence Number (NIK) with the Compulsory Tax Number (NPWP) for taxable individuals in the Tax Service Office (KPP) of Pratama Bogor is carried out. This matching is an important step in harmonizing population and tax data and improving the efficiency and effectiveness of tax services. The results of the survey show that the matching of NIK with NPWP in KPP Pratama Bogor brings significant benefits. Local and central governments can accurately identify taxpayers and integrate population data with tax data through this matching. It improves tax compliance overall. However, this review found some problems associated with the use of NIK matching with NPWP. Some of these include information technology infrastructure constraints, different data formats used in population and taxation databases, and data input errors that may affect matching results.

**Keywords:** NIK matching, NPWP, personal taxpayer, KPP Pratama Bogor, tax service effectiveness.

## ABSTRAK

Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mempelajari bagaimana pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dilaksanakan. Pemadanan ini merupakan langkah penting dalam penyelarasan data kependudukan dan pajak serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perpajakan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa pemadanan NIK dengan NPWP di KPP Pratama Bogor membawa manfaat yang signifikan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mengidentifikasi wajib pajak secara akurat dan mengintegrasikan data kependudukan dengan data perpajakan melalui pemadanan ini. Ini meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Namun, tinjauan ini menemukan beberapa masalah yang terkait dengan penggunaan pemadanan NIK dengan NPWP. Beberapa di antaranya termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, format data yang berbeda yang digunakan dalam basis data kependudukan dan perpajakan, dan kesalahan input data yang dapat memengaruhi hasil pemadanan.

**Kata Kunci:** Pemadanan NIK, NPWP, wajib pajak orang pribadi, KPP Pratama Bogor, efektivitas pelayanan perpajakan.

## PENDAHULUAN

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, namun kini diganti menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

JABKES

Jurnal Aplikasi Bisnis  
Kesatuan

Vol. 5 No. 1, 2025

page. 91 - 889IBI Kesatuan

ISSN 2807 - 6036

DOI: 10.37641/jabkes.v5i1.1959

Undang-undang yang mengatur perpanjangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang semula 15 digit menjadi 16 digit, akhirnya diundangkan oleh Menteri Keuangan pada 2022. Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan wajib pajak orang pribadi sebagai wajib pajak. identitas, yang merupakan pergeseran signifikan terhadap NPWP wajib pajak orang pribadi.

Pemerintah menerapkan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 (112/PMK.03/2022, 2022) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengatur penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah, dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Alhasil, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP kini resmi terintegrasi. Pada akhirnya, NIK telah menempuh perjalanan panjang untuk menjadi NPWP.

Kebijakan pemerintah terkait data yang kini diterapkan di Indonesia didukung oleh regulasi ini. Wajib Pajak tidak lagi diwajibkan untuk memiliki beberapa nomor identifikasi karena berbagai alasan sebagai akibat dari peraturan ini. Selain itu, memiliki identitas tunggal akan memudahkan pemerintah dalam melayani masyarakat. dalam pelayanan kependudukan dan kesehatan selain pelayanan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor sebagai salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, penerimaan, dan pemungutan pajak di wilayah nya. Salah satu tugas penting yang diemban oleh KPP Pratama Bogor adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan aturan perpajakan, KPP Pratama Bogor melakukan inovasi dalam pengawasan pelaporan pajak dengan mengimplementasikan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi. Pemadanan NIK dengan NPWP ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pajak yang terdaftar memiliki NPWP yang valid dan sesuai dengan NIK yang dimilikinya.

Pemadanan NIK dengan NPWP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan melakukan pemadanan ini, KPP Pratama Bogor dapat memastikan bahwa wajib pajak tidak melakukan pelaporan pajak dengan menggunakan NIK yang tidak sah atau NPWP yang tidak sesuai dengan identitas dirinya. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi potensi terjadinya penggelapan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Dalam proses pengumpulan dan pemrosesan data wajib pajak, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi, seringkali terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian antara data yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah identitas unik yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai acuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Salah satu faktor penyebab ketidaksesuaian data antara KTP dan NPWP adalah adanya perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP dengan Nomor Induk Wajib Pajak (NIWP) pada NPWP. NIK adalah nomor identitas penduduk yang tercantum pada KTP, sedangkan NIWP adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada setiap wajib pajak.

Ketidaksesuaian antara NIK dengan NIWP dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kesalahan input data oleh petugas, perubahan status perkawinan, perubahan alamat, atau faktor administratif lainnya. Akibatnya, data wajib pajak menjadi tidak akurat, dan proses administrasi perpajakan menjadi kurang efisien.

Untuk mengatasi permasalahan ini, DJP merencanakan implementasi pemadanan data antara NIK dengan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Pemadanan data ini bertujuan untuk menyamakan dan menyelaraskan informasi identitas wajib pajak yang terdapat pada KTP dan NPWP. Dengan demikian, data perpajakan menjadi lebih akurat, dan proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien.

Implementasi pemadanan NIK dengan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bogor dilakukan secara bertahap dan terencana. KPP Pratama Bogor telah

melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya memiliki NPWP yang valid dan memastikan data NIK dan NPWP yang dimilikinya sesuai dengan identitas dirinya. Selain itu, KPP Pratama Bogor juga menyediakan layanan konsultasi dan bimbingan teknis bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan pemadanan NIK dengan NPWP.

Dengan adanya implementasi pemadanan NIK dengan NPWP, diharapkan efektivitas pengawasan pelaporan pajak oleh KPP Pratama Bogor dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting.

Tujuan dari implementasi pemadanan NIK dengan NPWP ini adalah Selain itu, dengan pemadanan data yang lebih baik, diharapkan dapat memudahkan proses identifikasi wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban perpajakan dan memperkuat pengawasan pajak oleh KPP Pratama Bogor.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari tanggal 1 maret 2023 hingga 31 mei 2023 yang lokasi penelitiannya dilaksanakan di KPP Pratama Bogor, yang berlokasi di Jl.Ir.H.Juanda No.64 rt01/13, Paledang, Kec.Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian di peroleh dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Analisis Implementasi Pemadanan NIK dengan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bogor dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

### **1. Tujuan Implementasi**

Tujuan implementasi pemadanan NIK dengan NPWP adalah untuk memastikan bahwa data dan identitas wajib pajak tetap aman. Dengan memadankan NIK dan NPWP, kemungkinan kesalahan data, penyalahgunaan, dan duplikasi identitas wajib pajak dapat diminimalkan.

### **2. Sumber Data**

Untuk memadukan NIK dengan NPWP, Anda perlu mendapatkan akses ke dua sumber data utama: Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang menyediakan data NIK dan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang menyimpan data NPWP. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa kedua sumber tersebut tersedia dan akurat.

### **3. Proses Pemadanan**

NIK-NPWP pemadanan dapat dilakukan dengan algoritma atau metode pemadanan data yang tepat. Metode pemadanan fuzzy, atau berbasis aturan, adalah metode yang paling umum yang memungkinkan untuk menemukan korespondensi NIK-NPWP yang mirip secara keseluruhan atau sebagian.

### **4. Validasi Data**

Setelah pemadanan selesai, tahap validasi data dilakukan untuk memastikan NIK dan NPWP cocok satu sama lain. Ini dilakukan dengan membandingkan atribut tambahan seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan informasi lain yang penting. Jika ada kesalahan atau ketidakcocokan dalam data, perlu dilakukan koreksi atau verifikasi tambahan.

### **5. Integrasi Sistem**

Untuk melaksanakan pemadanan NIK dengan NPWP, integrasi sistem antara Dukcapil dan DJP diperlukan. Dibutuhkan mekanisme sinkronisasi data secara berkala antara kedua sistem untuk memastikan bahwa data selalu diperbarui. Selain itu, perlu dibangun mekanisme pengamanan data yang ketat untuk memastikan bahwa data wajib pajak aman dan rahasia.

#### 6. Manfaat dan Tantangan

Meskipun pemadanan NIK dengan NPWP memiliki banyak keuntungan, seperti meningkatkan keakuratan dan kevalidan data, mempercepat proses identifikasi wajib pajak, dan meminimalkan risiko kecurangan pajak, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti pembaruan data terus-menerus, penyelesaian masalah dalam pemadanan data yang tidak jelas, dan perlindungan data pribadi wajib pajak.

#### 7. Edukasi dan Sosialisasi

Penting melakukan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai implementasi pemadanan NIK dengan NPWP. Wajib pajak perlu diberikan pemahaman tentang manfaat, proses, dan pentingnya pemadanan data ini.

#### **Kendala yang di alami wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pelaporan pajak karena perbedaan NIK dengan NPWP**

Karena ada perbedaan antara NIK dan NPWP, wajib pajak orang pribadi mungkin mengalami kesulitan saat melaporkan pajak ke KPP Pratama Bogor. Beberapa masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

##### 1. Tidak dapat melakukan pendaftaran NPWP

Jika wajib pajak belum memiliki NPWP dan NIK mereka tidak sesuai dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mereka mungkin kesulitan melakukan pendaftaran NPWP di KPP Pratama Bogor. Ini dapat menghambat proses pelaporan pajak yang wajib dilakukan.

##### 2. Ketidaksesuaian data antara NIK dan NPWP

Jika NIK wajib pajak berbeda dengan data NPWP, mungkin sulit untuk melaporkan pajak dengan benar. Kesalahan data seperti ini dapat menyebabkan penolakan atau kesalahan dalam pengolahan laporan pajak oleh KPP Pratama Bogor.

##### 3. Kesulitan mengakses e-filing

Wajib pajak harus menggunakan NPWP dan NIK yang sah saat melakukan pelaporan pajak melalui e-filing. Jika ada perbedaan antara keduanya, wajib pajak mungkin mengalami kesulitan untuk mengakses sistem e-filing yang diperlukan untuk pelaporan pajak.

##### 4. Potensi denda dan sanksi

Jika wajib pajak tidak dapat melaporkan pajak dengan benar karena perbedaan NIK dan NPWP, ada kemungkinan mereka akan dikenakan denda atau sanksi oleh otoritas pajak. Ini dapat menambah beban finansial bagi mereka.

Wajib pajak harus menghubungi KPP Pratama Bogor untuk mendapatkan instruksi tambahan dan memperbaiki data yang salah. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa NIK dan NPWP yang dimiliki selalu diperbarui dan sesuai dengan data yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### **Dampak dari kesalahan dalam pengisian dan pelaporan pajak yang disebabkan oleh ketidakakuratan atau ketidaksamaan data NIK dan NPWP**

Bagi wajib pajak, kesalahan dalam pengisian dan pelaporan pajak yang disebabkan oleh ketidakakuratan atau ketidaksamaan data NIK dan NPWP dapat berdampak negatif, antara lain:

##### 1. Penolakan pelaporan

Jika data NIK dan NPWP tidak tepat atau tidak sesuai, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dapat menolak pelaporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam pemrosesan pelaporan dan potensi kewajiban denda atau sanksi karena pelaporan yang terlambat.

##### 2. Kehilangan manfaat perpajakan

Wajib pajak dapat kehilangan manfaat atau insentif perpajakan yang seharusnya mereka terima karena ketidaksamaan data NIK dan NPWP. Misalnya, mereka mungkin tidak dapat memanfaatkan potongan pajak tertentu atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan pajak.

##### 3. Denda dan Sanksi

Otoritas pajak dapat memberikan denda atau sanksi kepada wajib pajak jika mereka melaporkan pajak dengan salah karena ketidakakuratan atau ketidaksamaan data

NIK dan NPWP. Besar denda atau sanksi ini tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku dan tingkat kesalahan yang dilakukan.

4. Pemeriksaan pajak lebih lanjut

Jika ada kesalahan dalam pengisian dan pelaporan pajak, otoritas pajak dapat meminta wajib pajak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan ini dapat memakan waktu dan sumber daya, tetapi juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan tekanan bagi wajib pajak.

5. Kerugian keuangan

Jika data NIK dan NPWP tidak akurat atau tidak sama, wajib pajak dapat membayar jumlah pajak yang tidak akurat atau lebih tinggi dari seharusnya. Wajib pajak dapat kehilangan uang karena hal ini, mengganggu kestabilan keuangan pribadi mereka.

Untuk menghindari konsekuensi ini, wajib pajak harus memastikan bahwa data NIK dan NPWP yang mereka gunakan dalam pengisian dan pelaporan pajak akurat, sesuai, dan terdaftar dengan benar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika terjadi kesalahan, wajib pajak harus segera menghubungi KPP Pratama Bogor atau memperbarui data yang diperlukan agar dapat melaporkan pajak dengan benar.

**Proses identifikasi data wajib pajak yang benar dan akurat dapat dilakukan meskipun terdapat perbedaan data antara NIK dan NPWP**

Meskipun ada perbedaan data antara NIK dan NPWP, langkah-langkah berikut dapat digunakan untuk memastikan bahwa data wajib pajak benar dan akurat:

1. Periksa dokumen identitas resmi

Wajib pajak harus memastikan bahwa NIK yang tercantum pada dokumen identitas resmi, seperti KTP atau kartu identitas penduduk, yang mencantumkan NIK mereka. Pastikan bahwa NIK yang tercantum pada dokumen tersebut adalah yang benar dan sesuai dengan data diri.

2. Cek NPWP

Wajib pajak harus menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor atau menggunakan layanan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memverifikasi status NPWP mereka. Melalui proses ini, wajib pajak dapat memverifikasi apakah NPWP mereka terdaftar dan mengonfirmasi bahwa data yang terkait telah dikonfirmasi.

3. Komunikasi

Sangat penting untuk berkomunikasi dengan KPP Pratama Bogor jika terdapat perbedaan data antara NIK dan NPWP, KPP Pratama Bogor dapat membantu dalam memverifikasi data wajib pajak dan memberikan arahan yang diperlukan. Wajib pajak dapat menjelaskan situasi dan memberikan bukti dokumentasi yang menunjukkan identitas mereka, seperti fotocopy KTP, bukti alamat, atau dokumen pendukung lainnya.

4. Perbarui data di Dinas Kependudukan

Wajib pajak harus menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah mereka jika terdapat ketidaksesuaian antara NIK dan NPWP. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan perubahan data dengan dokumen yang diperlukan. Setelah data NIK terbaru, wajib pajak dapat menghubungi KPP untuk memastikan bahwa data yang sesuai di NPWP mereka telah diperbarui.

5. Pantau status perbaikan

Setelah proses perbaikan data selesai, sangat penting untuk memastikan bahwa NIK dan NPWP yang diperbarui sudah sesuai dan cocok. Pastikan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta KPP Pratama Bogor telah mengkonfirmasi bahwa perubahan data telah diterima dan diproses.

Jika ada perbedaan data antara NIK dan NPWP, sangat penting untuk segera melakukan perbaikan data untuk memastikan kesesuaian, sehingga pelaporan pajak dapat dilakukan dengan akurat dan tanpa hambatan.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama dan partisipasi wajib pajak dalam memastikan data NIK dan NPWP**

Ada sejumlah elemen yang mempengaruhi kerja sama dan keterlibatan wajib pajak dalam memastikan bahwa data yang dimilikinya, yaitu NIK dan NPWP, telah didaftarkan dengan benar dan sesuai, antara lain:

1. Kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya data yang akurat  
Wajib pajak harus menyadari dan memahami pentingnya data yang akurat dalam proses perpajakan karena data yang salah atau tidak akurat dapat menyebabkan kendala dan kesulitan dalam pelaporan pajak, serta menyebabkan denda dan sanksi.
2. Pendidikan dan Informasi yang memadai  
Wajib pajak harus dididik tentang pentingnya data yang akurat dan prosedur yang harus diambil untuk memastikan NIK dan NPWP mereka terdaftar dengan benar. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dapat menyediakan informasi ini melalui publikasi, pedoman, atau sesi penyuluhan.
3. Aksesibilitas dan ketersediaan layanan  
KPP Pratama Bogor harus memberikan layanan yang dapat diandalkan dan mudah diakses bagi wajib pajak, seperti menyediakan mekanisme yang jelas dan efektif untuk memeriksa dan memperbarui data NIK dan NPWP. Selain itu, sangat penting untuk mendorong partisipasi wajib pajak. Petugas yang kompeten dan ramah harus tersedia untuk memberikan bantuan dan petunjuk.
4. Transparansi dan kepercayaan  
Transparansi dalam proses pendaftaran, perubahan, dan perlindungan data pribadi wajib pajak sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi mereka. Wajib pajak harus percaya terhadap sistem perpajakan dan yakin bahwa data mereka akan diperlakukan dengan benar dan rahasia.
5. Penggunaan teknologi dan inovasi  
Teknologi canggih dan inovatif dapat membantu wajib pajak lebih sering mengakses dan memperbarui data NIK dan NPWP mereka. Layanan e-filing, pendaftaran online, atau penggunaan aplikasi seluler adalah beberapa contoh teknologi yang dapat membantu wajib pajak memperbarui data mereka.
6. Kebijakan yang mendukung  
Kebijakan dapat memengaruhi kerja sama wajib pajak dalam memperbarui data NIK dan NPWP. Kebijakan ini dapat menghapus biaya atau sanksi administrasi untuk perbaikan data yang tidak sesuai atau memberikan insentif untuk wajib pajak yang secara aktif memperbarui data mereka.

Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, diharapkan wajib pajak akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dan aktif memastikan bahwa data NIK dan NPWP mereka didaftarkan dengan benar.

### **Mengatasi keterbatasan sistem informasi yang digunakan oleh KPP Pratama Bogor dalam melakukan pepadanan data antara NIK dan NPWP**

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kekurangan sistem informasi yang digunakan oleh KPP Pratama Bogor dalam pepadanan NIK dan NPWP adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur dan teknologi  
KPP Pratama Bogor memiliki kemampuan untuk memperbarui dan meningkatkan infrastruktur teknologi mereka, yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan memadankan data NIK dan NPWP. Investasi dalam sistem informasi yang lebih baik, kecepatan akses yang lebih baik, dan keandalan jaringan.
2. Integrasi data dan kolaborasi  
Untuk mendapatkan akses langsung ke data NIK terbaru, KPP Pratama Bogor dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, KPP Pratama Bogor dapat memperbarui dan memadankan data NIK dan NPWP dengan lebih akurat dan efisien.

3. Peningkatan validasi data  
Untuk memastikan kesesuaian antara NIK dan NPWP, KPP Pratama Bogor dapat memperluas proses validasi data. Ini dapat mencakup penggunaan algoritma pemadanan data yang lebih canggih, pemeriksaan lintasreferensi data, dan verifikasi lebih lanjut dokumen identitas resmi yang diajukan wajib pajak.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian  
KPP Pratama Bogor dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian proses pemadanan data dengan mempekerjakan petugas yang terlatih secara khusus untuk memverifikasi dan memadankan data, memastikan prosedur dilakukan dengan cara yang jelas dan terdokumentasi, dan menggunakan sistem audit internal yang efektif.
5. Peningkatan pembaruan data secara periodik  
Melalui kampanye komunikasi yang efektif, KPP Pratama Bogor dapat mendorong wajib pajak untuk secara aktif memperbarui data mereka, baik NIK maupun NPWP. Dengan mendorong partisipasi wajib pajak dalam memperbarui data secara teratur, KPP Pratama Bogor dapat mengurangi jumlah kesalahan dan ketidaksesuaian data yang terjadi.
6. Pelatihan dan pengembangan SDM  
KPP Pratama Bogor dapat melatih petugas yang terlibat dalam pemadanan data untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya data yang akurat dan cara mengatasi keterbatasan sistem informasi. Pelatihan ini dapat mencakup peningkatan keterampilan teknis, pemahaman tentang peraturan perpajakan yang terkait dengan data, dan penggunaan alat bantu pemadanan data yang efektif.  
Dengan melakukan langkah-langkah ini, KPP Pratama Bogor dapat mengatasi keterbatasan sistem informasinya dalam pemadanan data antara NIK dan NPWP.

## **PENUTUP**

Bahwa terdapat kendala bagi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak karena perbedaan antara NIK dan NPWP. Beberapa masalah yang timbul akibat perbedaan tersebut meliputi kesulitan dalam pendaftaran NPWP, ketidaksesuaian data antara NIK dan NPWP, kesulitan mengakses e-filing, dan potensi denda atau sanksi. Akibatnya, wajib pajak harus melakukan beberapa langkah untuk memastikan data NIK dan NPWP mereka akurat dan sesuai, termasuk menghubungi KPP Pratama Bogor, memperbarui data yang salah, dan menghindari konsekuensi negatif yang mungkin terjadi akibat kesalahan pelaporan. Selain itu, kesalahan dalam pengisian dan pelaporan pajak yang disebabkan oleh ketidakakuratan atau ketidaksesuaian data NIK dan NPWP dapat berdampak negatif bagi wajib pajak. Hal ini dapat menyebabkan penolakan pelaporan, kehilangan manfaat perpajakan, denda, sanksi, pemeriksaan pajak lebih lanjut, dan kerugian keuangan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memperhatikan dengan cermat kecocokan data NIK dan NPWP mereka serta melakukan perbaikan data jika diperlukan.

Untuk mengatasi masalah perbedaan data NIK dan NPWP, wajib pajak harus meningkatkan kerjasama dan partisipasi dengan memahami pentingnya data yang akurat, mencari informasi yang tepat, mengakses layanan yang mudah dijangkau, dan memperbarui data secara berkala. Selain itu, KPP Pratama Bogor juga harus meningkatkan sistem informasi dengan memperbarui infrastruktur dan teknologi, melakukan integrasi data, meningkatkan validasi data, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah ini, harapannya kesalahan dan kendala akibat perbedaan data NIK dan NPWP dapat diminimalkan, dan proses pelaporan pajak menjadi lebih efisien dan akurat bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bogor.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Goh, S. T dkk. 2023. *Kegiatan Peningkatan Kesadaran Pajak Dan Pemadanan NIK-NPWP Oleh Relawan Pajak*. Universitas Methodist Indonesia. Medan.
- [2] Indriani, A dkk. 2023. *Sosialisasi Perpajakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPH Orang Pribadi Dan UMKM*. Universitas Darma Persada. Jakarta.
- [3] Kurniyawati, I dkk. 2023. *Sosialisasi Pemadanan NIK Menjadi NPWP Di Universitas Lamongan*. Jawa Timur.
- [4] Kurnianingsih, R dkk. 2023. *Pendampingan Pendaftaran NPWP Forkom UMKM Seyegan Kabupaten Sleman*. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Yogyakarta.
- [5] Lestari, S. M. 2020. *Tinjauan Tata Cara Penyitaan Terhadap Wajib Pajak Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor*. Bogor.
- [6] Panjaitan, R. M. 2022. *Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I*. Sumatera Utara.
- [7] Rahayu, S dkk. 2023. *Kegiatan Asisetensi Pelaporan SPT Tahunan Dan Pemadanan NPWP Dengan NIK Pada Wajib Pajak Di Surakarta*. Universitas Dharma AUB. Surakarta.
- [8] Suandy, E. 2016. *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- [9] Winoto, A. H. 2013. *Prosedur Dan Tata Cara Pemotongan PPH Pasal 22 Pada KPP Pratama Bogor*. Bogor.